



KEYNOTE SPEECH
Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)
“APBN dan Transisi Keuangan menuju Ekonomi Hijau”
Manado, Kamis, 9 Juni 2022
09.40 – 10.00 WITA



OPENING REMARKS (20 menit)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati:

Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey
Ketua Umum ADPMET, Bapak Ridwan Kamil atau yang mewakili
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Jenderal Migas,
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Sekjen Kementerian Perindustrian,
dan Bapak/Ibu Peserta Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan 2022 yang berbahagia.

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga pagi ini kita dapat bertemu dalam **Rapat Kerja ADPMET dengan tema Transisi Keuangan Menuju Energi Hijau.**

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili Ibu Menteri Keuangan dalam membuka acara ini dan menyampaikan *keynote speech* tentang **APBN dan Transisi Keuangan Menuju Energi Hijau**. Topik ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Saya yakin APBN sebagai bentuk konvensi nasional tetap digunakan sebagai instrumen kebijakan pembangunan nasional, yang di antaranya meliputi mitigasi perubahan iklim dan kebijakan transisi energi.

Hadirin, Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Visi Indonesia adalah menjadi negara maju di tahun 2045. Untuk mencapai hal ini diperlukan beberapa prasyarat yaitu infrastruktur yang memadai, SDM yang berkualitas tinggi, kemampuan adopsi teknologi, serta pembangunan daerah dan kebijakan yang baik. Indonesia memiliki kelebihan di sisi demografi yang mayoritas merupakan usia produktif dan berpenghasilan menengah. Hal ini merupakan suatu peluang pembangunan tersendiri.

Masa bonus demografi menjadi momentum penguatan fondasi dan daya saing menuju

reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah reformasi struktural seperti reformasi sektor riil melalui omnibus law cipta kerja, reformasi sektor keuangan, dan reformasi fiskal. Di tahun 2021, Pemerintah menggulirkan dua paket reformasi fiskal, yakni UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Penguatan kinerja ekonomi jangka menengah dan panjang membutuhkan akselerasi produktivitas nasional. Diperlukan upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk kembali ke jalur pra-pandemi. Krisis akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan produktivitas karena tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, hingga *learning loss*. Mesin pertumbuhan perlu di-*reset* untuk kembali ke jalur sebelum krisis.

Sebelum pandemi, Indonesia berada dalam momentum pertumbuhan di mana perekonomian relatif stabil, pembangunan infrastuktur dilakukan secara masif, reformasi birokrasi terus berlanjut, dan iklim investasi semakin kuat. Di masa pasca pandemi, dibutuhkan penciptaan sumber pertumbuhan baru. Implementasi agenda reformasi struktural merupakan katalis pertumbuhan ekonomi, yang meliputi percepatan program prioritas pemerintah serta percepatan kemandirian energi dan pangan.

Upaya reformasi struktural tentu akan dilanjutkan pada tahun 2023.

Tahun 2023 cukup menantang karena merupakan tahun konsolidasi fiskal menuju defisit APBN di bawah 3% PDB. Konsolidasi fiskal disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif dari sisi pendapatan, perbaikan belanja (*spending better*), dan pembiayaan yang produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi kebijakan fiskal 2023 yang ditempuh Pemerintah adalah: **Pertama**, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. **Kedua**, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi, yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan *spending better* untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta pengembangan pembiayaan yang inovatif.

Hadirin, Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau sangat rentan akan risiko perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut. Dari tahun 1981 hingga 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0.03 derajat celcius per tahun. Selain itu indonesia mengalami kenaikan permukaan laut sebesar 0,8-1,2 cm/tahun, sementara 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai 80 persen dari total bencana yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia berpotensi

mengalami total kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun dalam kurun waktu 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim bila tidak ada intervensi kebijakan.

Kementerian Keuangan telah menyusun kebijakan Climate Change Fiscal Framework (CCFF), yaitu kerangka kebijakan fiskal yang mendukung tantangan perubahan iklim, dan ini juga konsisten dengan tekad untuk menurunkan emisi CO₂ bahkan Net Zero Emission pada tahun 2060.

Arah reformasi struktural dan fiskal, selanjutnya, diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Berkelanjutan mengandung makna: pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan keadilan antargenerasi. Saya yakin pembangunan ekonomi hijau mempunyai nilai strategis dalam kebijakan fiskal. Kebijakan pembangunan ekonomi hijau di antaranya: (a) peningkatan **porosi energi baru terbarukan (EBT)** dalam bauran energi nasional, (b) **pengembangan industri berbasis baterai**, (c) pengembangan **Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**, (d) **mobilisasi pembiayaan ekonomi hijau**, dan (e) **optimalisasi kerja sama internasional**.

Dalam konteks strategis mengenai isu lingkungan hidup maupun *green economy*, Indonesia ikut mengambil bagian dalam aksi penanganan perubahan iklim global dengan meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di dalam Second Biennial Update Report (BUR) 2018, Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 mencapai Rp3.461 triliun, atau Rp266,2 triliun per tahun. Untuk itu, Pemerintah akan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk **mencapai target agenda perubahan iklim, utamanya dari sisi pendanaan.**

Pemerintah secara aktif telah mendesain berbagai kebijakan fiskal yang mendukung percepatan transisi energi. Berbagai kebijakan tersebut meliputi kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Mekanisme Transisi Energi, Inisiatif Penandaan Anggaran Perubahan Iklim, dan Pajak Karbon melalui UU HPP.

Kebijakan Pertama adalah pengembangan EBT yang merupakan *roadmap* sektor kelistrikan menuju NZE. Sektor kelistrikan diperkirakan menyumbang emisi sebesar 0,92 miliar ton CO₂ pada tahun 2060. Menyiasati hal tersebut perlu disusun strategi penurunan emisi melalui peningkatan EBT dan penurunan pembangkit *fossil based*.

Kebijakan Kedua adalah Pajak Karbon. Kebijakan pajak karbon merupakan instrumen kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim melalui nilai ekonomi karbon. Pajak karbon merupakan amanat pasal 17 ayat (3) UU HPP yang dimulai tahun 2022. Pajak karbon akan dikenakan pertama kali pada badan yang bergerak di bidang PLTU batubara dengan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi.

Kebijakan Ketiga adalah Energy Transition Mechanism (ETM) yang mencakup *Carbon Reduction Fund* (CRF) dan *Clean Energy Program* (CEF). CRF merupakan dana yang digunakan untuk *me-retire* PLTU lebih awal dari masa kontrak. CEF adalah dana yang digunakan untuk membangun pembangkit energi yang *renewable*.

Kebijakan Keempat adalah kebijakan pendanaan perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT). CBT merupakan alat bantu bagi pemerintah Indonesia untuk menelusuri output dan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Pemerintah Pusat sejak tahun 2016, dan dikembangkan di tingkat daerah sejak tahun 2020. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur. Selama periode 2016 hingga 2020, rata-rata belanja pemerintah pusat per tahun untuk mitigasi sebesar Rp61,45T dan adaptasi sebesar Rp30,31T. Berdasarkan Roadmap NDC, belanja mitigasi tersebut setara 17,92% dari kebutuhan rata-rata per tahun sebesar Rp 343T, dan belanja adaptasi setara 17,52% dari kebutuhan rata-rata per tahun sebesar Rp 173T. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung pencapaian target NDC mitigasi dan adaptasi hingga tahun 2030.

Karena kebutuhan dana yang besar untuk transisi menuju ke energi hijau, selain sokongan APBN pemerintah juga mengembangkan *blended finance* dan optimalisasi Special Mission Vehicle (SMV) seperti BPD LH, PT. SMI, PT PTT, Geodipa. Pemerintah juga meluncurkan berbagai insentif perpajakan untuk pengembangan EBT berupa *tax holiday*, *tax allowance*, PPh DTP, pengecualian pemungutan PPh 22 impor dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, pemerintah juga memberikan alokasi anggaran daerah untuk pengelolaan sampah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID).

Sementara di sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan telah mengembangkan Green Bond/Sukuk Framework dan SDG Government Securities Framework sebagai dasar penerbitan instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung pencapaian target pengendalian perubahan iklim. Pemerintah telah konsisten menerbitkan Global Green Sukuk sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 yang secara total telah menyerap pembiayaan hijau sebesar USD 3,5 miliar. Tidak hanya di pasar internasional, Pemerintah pun menerbitkan Green Sukuk Retail sejak tahun 2019 sebagai upaya pendalaman sektor keuangan serta demi menjangkau seluruh masyarakat Indonesia agar turut berkontribusi membangun negara sekaligus bersama-sama mengendalikan perubahan iklim. Hasilnya pun sangat menjanjikan, tiga kali penerbitan Green Sukuk Retail mampu memperoleh Rp 11,8 triliun yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur hijau di Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah pun menerbitkan SDGs Bond sebesar 500 juta euro sebagai instrumen pembiayaan yang secara khusus digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas baik dalam aspek sosial maupun lingkungan.

Di tingkat global, Indonesia sebagai pengemban Presidensi G20 tahun ini juga memfokuskan pembahasan transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu dari 3 isu prioritas, di mana 2 prioritas lain adalah arsitektur kesehatan global dan transformasi digital.

PENUTUP

Saya berharap **Rapat Kerja ADPMET 2022** ini dapat memberikan ide-ide baru dalam transisi menuju energi hijau. Saya juga berharap diskusi ini memberikan rekomendasi kebijakan tentang bagaimana **pemerintah, asosiasi, dan sektor swasta dapat berkolaborasi secara aktif untuk mendukung transisi menuju energi hijau secara adil dan terjangkau (*just and affordable*) dalam rangka mencapai *Net Zero Emission*.**

Saya optimis Indonesia dapat berkontribusi optimal dalam menurunkan emisi dan memitigasi perubahan iklim. Untuk tujuan tersebut, selain sokongan dari APBN, juga diperlukan kerja sama yang *solid* antara pemerintah dan sektor swasta.

Saya menantikan pertukaran pandangan dan praktik terbaik dengan Anda semua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MASYITA CRYSTALLIN
Staf Khusus Menteri Keuangan